



**EVALUASI HASIL  
RENJA PERANGKAT  
DAERAH**

**TRIWULAN IV TAHUN 2022**

**INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN PESISIR  
SELATAN**





## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya dalam memberikan kekuatan sehingga Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, kondisi Triwulan IV ini dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Dengan selesainya Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini. Semoga laporan ini dapat menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah serta menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan sinergi langkah-langkah kebijakan, program/kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Kami sadar bahwa laporan ini sangat sederhana dan masih banyak kekurangan. Demi kelancaran pelaksanaan program dan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada masa yang akan datang, kami berharap masukan dan saran yang sifatnya membangun untuk perbaikan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan kedepannya.

Painan, 30 Desember 2022  
Inspektur,



DARUSDYANTO, S.H., M.Hum.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19641112 199203 1 008



## DAFTAR ISI

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| KATA PENGANTAR.....  | i                              |
| DAFTAR ISI .....   | Error! Bookmark not defined.ii |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                   | <b>1</b>                       |
| 1.1 Latar Belakang .....   | 1                              |
| 1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....                                 | 4                              |
| 1.3 Maksud dan Tujuan .....                                      | 6                              |
| 1.3.1 Maksud .....   | 6                              |
| 1.3.2 Tujuan .....   | 7                              |
| 1.4 Metodologi .....   | 7                              |
| 1.5 Sistematika Penulisan .....                                  | 8                              |
| <b>BAB II CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA</b>         |                                |
| <b>PROGRAM/ KEGIATAN RKPD .....</b>                              | <b>9</b>                       |
| 2.1 Anggaran Belanja .....                                       | 9                              |
| 2.2 Pencapaian Target Kinerja APBD pada Inspektorat Daerah ..... | 9                              |
| <b>BAB III EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA INSPEKTORAT</b> |                                |
| <b>DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN .....</b>                    | <b>12</b>                      |
| 3.1 Evaluasi Terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah.....        | 12                             |
| 3.2 Hambatan dan Kendala Pencapaian Target Kinerja .....         | 16                             |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                                      | <b>17</b>                      |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Untuk menjamin suatu program pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan adanya pengendalian dan evaluasi sebagai suatu rangkaian kegiatan manajemen pemerintahan. Landasan konstitusional pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Untuk mengimplementasikan Undang-undang tersebut, ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Ruang lingkup Pengendalian dan Evaluasi yang didasarkan Undang-Undang 25 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 adalah Program dan Kegiatan yang dananya bersumber dari APBN yang dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan. Dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 disebutkan bahwa Bappeda Kabupaten/Kota menyusun laporan triwulan pelaksanaan Tugas Pembantuan di Daerah dengan menggunakan laporan Triwulan PD.

Sistem perencanaan pembangunan nasional di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 membagi ruang





lingkup Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses yang direncanakan dalam rangka mencapai kondisi yang lebih baik dibandingkan keadaan sebelumnya. Nilai yang dipegang dalam pembangunan adalah optimalnya sumber daya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik dengan penyusunan tahapan-tahapan kegiatan dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada guna meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat Undang-Undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 dan dilaksanakan melalui APBD tahun 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran



Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah dibentuk tim penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.

Tim yang dibentuk telah melakukan evaluasi yang meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Evaluasi RKPD yang dilakukan bertujuan untuk melihat perkembangan hasil pelaksanaan RKPD dan keselarasan antara APBD dengan RKPD serta memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan kebijakan.

Evaluasi RKPD triwulan IV Tahun Anggaran 2022 didasarkan kepada pencapaian kinerja pembangunan sampai dengan tanggal 30 Desember 2022, fenomena pembangunan yang ada, isu-isu strategis seperti telah banyak menyedot APBD tahun 2022 dan mempengaruhi Anggaran tahun 2022, serta pertimbangan sinergitas antar sektor pembangunan. Sebagai dokumen evaluasi perencanaan pembangunan tahunan selama tahun berjalan, diharapkan hasil evaluasi dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKPD tahun 2023.



## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata



Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 79);





10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2022;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 83 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud.**

Maksud dari Evaluasi RKPD Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Triwulan IV Tahun 2022 adalah untuk menilai dan mengevaluasi :

1. Pencapaian target-target rencana program-kegiatan daerah sesuai dalam RKPD Tahun 2022.
2. Realisasi penyerapan anggaran kegiatan perangkat daerah sesuai dalam DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

### 1.3.2. Tujuan.

1. Memberikan gambaran proses pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah hingga Triwulan IV sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RKPD Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 berdasarkan realisasi anggaran.
2. Memberikan gambaran realisasi penyerapan anggaran kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah hingga triwulan IV sesuai yang telah ditetapkan dalam DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.
3. Menjadikan pola tahapan evaluasi RKPD triwulan IV ini sebagai sistem untuk terus dilakukan pada evaluasi triwulan RKPD Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Menjadikan hasil evaluasi RKPD triwulan IV ini sebagai basis data untuk keperluan evaluasi-evaluasi lainnya.

### 1.4 Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan penyusunan evaluasi RKPD ini yaitu dengan menghitung capaian kinerja program dan kegiatan dengan menggunakan kategori *interval* nilai realisasi kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan berkenaan. Penggunaan kategori interval ini akan membantu pengklasifikasian penilaian realisasi kinerja program dan kegiatan berdasarkan target rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Kategori interval yang digunakan adalah sebagai berikut :



### Kriteria Penilaian dan Interval Nilai Realisasi Kinerja Evaluasi Hasil RKPD

| No | Kriteria Penilaian | Simbol | Interval Nilai |
|----|--------------------|--------|----------------|
| 1  | Sangat Tinggi      | ST     | 91 % ≤ 100 %   |
| 2  | Tinggi             | T      | 76 % ≤ 90 %    |
| 3  | Sedang             | S      | 66 % ≤ 75 %    |
| 4  | Rendah             | R      | 51 % ≤ 65 %    |
| 5  | Sangat Rendah      | SR     | ≤ 50 %         |

Sumber : Permendagri 86/2017

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 kondisi Triwulan IV disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan, mencakup Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Metodeologi serta Sistematika Penulisan Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.
- BAB II : Capaian Target Kinerja Dan Penyerapan Dana Program/ Kegiatan RKPD, menjelaskan tentang Capaian Target Kinerja, dan Pencapaian Target Kinerja APBD pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- BAB III : Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, menjelaskan tentang Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Hambatan/Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja yang telah ditetapkan.
- BAB IV : Penutup

## BAB II

### CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM / KEGIATAN RKPD

#### 2.1 Anggaran Belanja

Pada tahun 2022 Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mendapat belanja baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung sejumlah Rp. 8,859,067,280,-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Pada Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1 : Belanja Langsung dan Belanja Tidak langsung  
Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan  
Tahun 2022

| NO | URAIAN                        | JUMLAH<br>ANGGARAN      |
|----|-------------------------------|-------------------------|
| 1  | <b>Belanja Tidak Langsung</b> | <b>6,394,627,645.00</b> |
|    | Belanja Pegawai               | 6,394,627,645.00        |
| 2  | <b>Belanja Langsung</b>       | <b>2,464,439,635.00</b> |
|    | Belanja Pegawai               | 91,407,355.00           |
|    | Belanja Barang dan Jasa       | 2,359,314,180.00        |
|    | Belanja Modal                 | 13,718,100.00           |
|    | <b>Jumlah</b>                 | <b>8,859,067,280.00</b> |

#### 2.2 Pencapaian Target Kinerja APBD pada Inspektorat Daerah

Keberhasilan pencapaian target kinerja dari pelaksanaan program/kegiatan wajib dan penunjang Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan tupoksinya dapat dilihat dari realisasi kinerja program/kegiatan.

Pencapaian target kinerja Keuangan Inspektorat Daerah Triwulan IV tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 2.2 :  
Pencapaian target kinerja Keuangan Inspektorat Daerah Triwulan IV**

| No        | PROGRAM/ KEGIATAN  | BELANJA LANGSUNG   |                    |               |
|-----------|--|--------------------|--------------------|---------------|
|           |  | ANGGARAN           | REALISASI          | %             |
| <b>A.</b> | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>  | <b>864,914,255</b> | <b>838,268,051</b> | <b>96.92%</b> |
| <b>1</b>  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | <b>91,407,355</b>  | <b>90,407,355</b>  | <b>98.91%</b> |
|           | Penyediaan Adminisrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 91,407,355         | 90,407,355         | 98.91%        |
| <b>2</b>  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>   | <b>50,000,000</b>  | <b>48,564,797</b>  | <b>97.13%</b> |
|           | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi  | 50,000,000         | 48,564,797         | 97.13%        |
| <b>3</b>  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>291,333,620</b> | <b>289,222,582</b> | <b>99.28%</b> |
|           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | 8,288,500          | 8,288,500          | 100.00%       |
|           | Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor   | 13,718,100         | 12,758,810         | 93.01%        |
|           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | 40,537,530         | 40,537,530         | 100.00%       |
|           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | 17,342,490         | 17,342,490         | 100.00%       |
|           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | 5,400,000          | 5,400,000          | 100.00%       |
|           | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | 21,600,000         | 21,600,000         | 100.00%       |
|           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 184,447,000        | 183,295,252        | 99.38%        |
| <b>4</b>  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>164,160,680</b> | <b>145,867,415</b> | <b>88.86%</b> |
|           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | 42,298,500         | 24,831,445         | 58.71%        |
|           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 121,862,180        | 121,035,970        | 99.32%        |
| <b>5</b>  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                       | <b>268,012,600</b> | <b>264,205,902</b> | <b>98.58%</b> |
|           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 193,101,600        | 189,294,902        | 98.03%        |
|           | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 16,600,000         | 16,600,000         | 100.00%       |
|           | Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | 58,311,000         | 58,311,000         | 100.00%       |

| No        | PROGRAM/ KEGIATAN   | BELANJA LANGSUNG     |                      |               |
|-----------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|           |   | ANGGARAN             | REALISASI            | %             |
| <b>B.</b> | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>   | <b>1,536,725,630</b> | <b>1,522,337,636</b> | <b>99.06%</b> |
| <b>6</b>  | <b>Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>   | <b>1,223,986,070</b> | <b>1,215,857,026</b> | <b>99.34%</b> |
|           | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah  | 56,273,000           | 56,139,500           | 99.76%        |
|           | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah   | 692,449,340          | 691,699,240          | 99.89%        |
|           | Reviu Laporan Kinerja   | 94,715,410           | 92,705,060           | 97.88%        |
|           | Reviu Laporan Keuangan  | 24,592,020           | 19,544,180           | 79.47%        |
|           | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 355,956,300          | 355,769,046          | 99.95%        |
| <b>7</b>  | <b>Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>                                       | <b>312,739,560</b>   | <b>306,480,610</b>   | <b>98.00%</b> |
|           | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah  | 50,984,200           | 49,160,200           | 96.42%        |
|           | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu   | 261,755,360          | 257,320,410          | 98.31%        |
| <b>C.</b> | <b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>  | <b>62,799,750</b>    | <b>60,249,750</b>    | <b>95.94%</b> |
| <b>8</b>  | <b>Pendampingan dan Asistensi</b>   | <b>62,799,750</b>    | <b>60,249,750</b>    | <b>95.94%</b> |
|           | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah   | 62,799,750           | 60,249,750           | 95.94%        |
|           | <b>Total</b>  | <b>2,464,439,635</b> | <b>2,420,855,437</b> | <b>98.23%</b> |

Berdasarkan Tabel, fungsi Pengawasan yang diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui 3 Program, 8 Kegiatan dan 23 sub kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp 2,464,439,635,- (tidak termasuk Gaji dan Tunjangan ASN) sampai dengan akhir Triwulan IV, telah terealisasi sebesar Rp 2,420,855,437,- atau 98.23% dengan semua kegiatan pengawasan yang direncanakan terealisasi dengan baik.



### BAB III

## EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

### 3.1 Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap hasil RKPD Kabupaten Pesisir Selatan mencakup sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas Kabupaten Pesisir Selatan. Evaluasi sebagaimana dimaksud dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan Rencana Kerja pada masing-masing perangkat daerah.

Laporan Evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 disusun untuk mengetahui tingkat capaian kinerja pelaksanaan RKPD terhadap target rencana program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2022 serta mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas.

Realisasi keuangan sampai dengan 30 Desember 2022 (Triwulan IV) ini sebesar Rp. 8,670,643,540,- dengan persentase capaian sebesar 97,87%. Sementara itu untuk capaian kinerja RPJMD 99,41 % (Sangat Tinggi) dan capaian keuangan RPJMD sebesar 67,26 % (Sedang). Sesuai dengan daftar terlampir.







# EVALUASI HASIL RKPD - TRIWULAN 3

2022

| No | Sasaran                   | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja (Outcome/Output)  | Target Kinerja Renstra PD pada Tahun 2022   |               | Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2021) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2022) yang Diwawaskan |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             |             |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Diwawaskan | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (%) |            | SKPD Penanggung Jawab |             |             |             |               |             |             |                   |     |
|----|---------------------------|---------------|---|---|---|---------------|---|---------------|--|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|---|--|--|------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|-----|
|    |                           |               |   |   | 6   |               | 7   |               | 8  |             | 9                               |             | 10          |             |   |  | 11   |            |                       | 12          |             | 13          |               | 14 = 7+13   |             | 15 = 14/6 X 100 % |     |
|    |                           |               |   |   | K   | Rp.           | K   | Rp.           | K  | Rp.         | K                               | Rp.         | K           | Rp.         |   |  | K  | Rp.        |                       | K           | Rp.         | K           | Rp.           | K           | Rp.         | K                 | Rp. |
|    |                           |               | 2-00  | Pemeliharaan Barang Bilik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |   | 240,000,000   | 224,631,200   | 266,812,600   | 51,689,353   | 90,706,050  | 5                               | 41,853,200  | 21          | 80,157,299  | 264,205,902   | -  | 488,837,102  | 49.98      | 203.88                | INSPEKTORAT |             |             |               |             |             |                   |     |
|    |                           |               | 02  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                      | 13            | 145,000,000   | 182,224,500   | 13   | 193,101,600 | 4                               | 50,284,363  | 6           | 32,386,050  | 1   | 38,023,200   | 2  | 67,612,299 | 13                    | 189,294,902 | 13          | 371,510,402 | 52.00         | 113.54      | INSPEKTORAT |                   |     |
|    |                           |               | 06  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | 20            | 80,000,000  | 12,050,000    | 31   | 16,800,000  | 3                               | 1,426,000   | -           | 4           | 2,630,000   | 19   | 12,545,000   | 26         | 16,800,000            | 26          | 28,650,000  | 81.25       | 30.78         | INSPEKTORAT |             |                   |     |
|    |                           |               | 09  | Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Oleh rehabilitasi   | 1             | 35,000,000  | 30,366,700    | 1  | 68,311,000  | -                               | -           | 1           | 68,311,000  | -   | -  | 1  | 68,311,000 | 1                     | 88,697,700  | 7.69        | 136.67      | INSPEKTORAT   |             |             |                   |     |
| 2  | Meningkatkan Mutu dan SFP | 6 01 02       |   | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN  |   | 2,095,000,000 | 1,904,313,140   | 1,536,725,630 | 474,394,290  | 492,953,880 | 44                              | 202,148,529 | 48          | 442,842,978 | 1,522,337,836   | -  | 3,026,850,776  | 136.09     | 85.03                 | INSPEKTORAT |             |             |               |             |             |                   |     |
|    |                           |               | 2.01  | Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal  |   | 1,405,000,000 | 1,067,488,980   | 1,223,986,070 | 363,318,610  | 349,989,760 | 44                              | 167,976,500 | 48          | 338,571,956 | 1,215,857,026   | -  | 2,273,346,116  | 74.96      | 92.32                 | INSPEKTORAT |             |             |               |             |             |                   |     |
|    |                           |               | 01  | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah  | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah   | 10            | 125,000,000   | 4             | 72,806,000   | 4           | 56,273,000                      | -           | -           | 4           | 56,139,500  | -  | -  | 4          | 56,139,500            | 4           | 128,945,500 | 28.57       | 66.19         | INSPEKTORAT |             |                   |     |
|    |                           |               | 02  | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah   | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah  | 100           | 570,000,000   | 104           | 547,341,540  | 144         | 692,449,340                     | 50          | 266,500,730 | 30          | 188,612,510   | 32   | 98,151,000   | 32         | 181,436,000           | 144         | 691,899,240 | 144         | 1,239,040,780 | 64.55       | 110.88      | INSPEKTORAT       |     |
|    |                           |               | 03  | Revisi Laporan Kinerja  | Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja   | 8             | 150,000,000   | 4             | 76,620,980   | 14          | 94,716,410                      | 2           | 63,600      | 1           | 38,228,510  | -  | 5  | 64,423,050 | 8                     | 92,705,000  | 8           | 160,326,050 | 69.67         | 74.72       | INSPEKTORAT |                   |     |
|    |                           |               | 04  | Revisi Laporan Keuangan   | Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan  | 5             | 110,000,000   | 1             | 58,280,510   | 6           | 24,692,020                      | 1           | 4,273,000   | -           | 9,970,180   | -  | 5  | 5,301,000  | 6                     | 19,544,180  | 6           | 78,824,800  | 100.00        | 46.56       | INSPEKTORAT |                   |     |
|    |                           |               | 07  | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APF  | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APF | 12            | 450,000,000   | 12            | 301,440,050  | 30          | 355,956,300                     | 6           | 63,491,580  | 6           | 73,039,060  | 12   | 71,826,500   | 6          | 117,412,908           | 30          | 355,769,048 | 30          | 667,209,068   | 125.00      | 87.46       | INSPEKTORAT       |     |
|    |                           |               | 2.02  | Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu  |   | 650,000,000   | 9   | 448,824,050   | 312,739,560  | 111,075,470 | 58,964,100                      | 34,170,020  | 104,271,020 | 366,730,360 | 100   | 783,304,660  | 197.22   | 68.68      | INSPEKTORAT           |             |             |             |               |             |             |                   |     |
|    |                           |               | 01  | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/daerah  | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/daerah yang Ditangani   | 1             | 200,000,000   | -             | 1  | 50,984,200  | 2,443,800                       | 12,800,000  | 17,324,400  | 1           | 16,692,000  | 1  | 49,190,200   | 1          | 49,190,200            | 100.00      | 24.66       | INSPEKTORAT |               |             |             |                   |     |
|    |                           |               | 02  | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu   | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu  | 45            | 450,000,000   | 9             | 448,824,050  | 159         | 281,756,360                     | 92          | 108,631,670 | 12          | 44,164,100  | 6  | 16,846,020   | 49         | 87,679,020            | 159         | 267,320,410 | 159         | 704,144,460   | 294.44      | 78.52       | INSPEKTORAT       |     |
| 3  |                           | 6 01 03       |   | PROGRAM PERUMBUHAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI  |   | 200,000,000   | -   | 62,799,750    | -  | -           | -                               | -           | -           | -           | -   | 60,248,750   | 41   | 60,248,750 | 100.00                | 30.12       | INSPEKTORAT |             |               |             |             |                   |     |
|    |                           |               | 2.02  | Pendampingan dan Asistensi  |   | 200,000,000   | 0   | -             | 41   | 62,799,750  | -                               | -           | -           | -           | -   | 60,248,750   | 41   | 60,248,750 | 100.00                | 30.12       | INSPEKTORAT |             |               |             |             |                   |     |



EVALUASI HASIL RKPD - TRIWULAN 3

2022

| No   | Saasaran | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja (Outcome)(Output)  | Target Kinerja Renstra PD pada Tahun 2022 |             | Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2021) |     | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi |            | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |     |    |     |     |     |    |            | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD eid Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD eid Tahun 2022 (%) |            | SKPD Penanggung Jawab |                   |             |
|--|----------|---------------|--|--|---|-------------|---|-----|--|------------|---------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|----|------------|---|--|--|------------|-----------------------|-------------------|-------------|
|  |          |               |  |  | K   | Rp.         | K   | Rp. | K  | Rp.        | I                               |     | II |     | III |     | IV |            |   |  | 14 = 7 + 13  |            |                       | 15 = 14/8 X 100 % |             |
| 1  | 2        | 3             | 4  | 5  | 6   |             | 7   |     | 8  |            | 9                               |     | 10 |     | 11  |     | 12 |            | 13  |  | 14 = 7 + 13  |            | 15 = 14/8 X 100 %     |                   | 16          |
|  |          |               |  |  | K   | Rp.         | K   | Rp. | K  | Rp.        | K                               | Rp. | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp.        | K   | Rp.  | K  | Rp.        | K                     | Rp.               |             |
|  |          |               | 01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                   | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 41 Perangkat Daerah                       | 200,000,000 | 0   |     | 41   | 62,759,750 |                                 |     |    |     |     |     | 41 | 60,248,750 | 41  | 60,248,750   | 41   | 60,248,750 | 100.00                | 30.12             | INSPEKTORAT |
| <b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>   |          |               |  |  |   |             |   |     |  |            |                                 |     |    |     |     |     |    |            |   |  | 99.41  | 67.28      |                       |                   |             |
| <b>PERINGKAT KINERJA</b>   |          |               |  |  |   |             |   |     |  |            |                                 |     |    |     |     |     |    |            |   |  | ST   | S          |                       |                   |             |
| <b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM</b> |          |               |  |  |   |             |   |     |  |            |                                 |     |    |     |     |     |    |            |   |  | 73.77  | 98.84      |                       |                   |             |
| <b>PERINGKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM</b>                            |          |               |  |  |   |             |   |     |  |            |                                 |     |    |     |     |     |    |            |   |  | ST   | ST         |                       |                   |             |
| Realisasi Anggaran Seluruh Program                                       |          |               |  |  |   |             | 8,859,067,280   |     |  |            |                                 |     |    |     |     |     |    |            |   |  |  |            |                       |                   |             |



### 3.2 Hambatan dan Kendala Pencapaian Target Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima laporan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi Pemerintah. Dalam hal pencapaian target kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan memiliki hambatan dan kendala-kendala, sebagaimana yang diuraikan dibawah ini :

- a. Masih terbatasnya personil (tenaga fungsional pengawas) yang mengakibatkan belum seimbangny jumlah personil ada dengan jumlah objek pemeriksaan baik pemeriksaan reguler maupun pemeriksaan kasus/khusus.
- b. Masih rendahnya kesadaran objek pemeriksaan dalam menjalankan rekomendasi pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP).
- c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memberikan informasi adanya penyimpangan (KKN).

## BAB IV

### PENUTUP

Laporan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi acuan untuk mengetahui ketercapaian program kegiatan yang telah dilaksanakan dan merupakan landasan penilaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Keberhasilan program - program pembangunan akan sangat bergantung pada komitmen pimpinan beserta jajarannya serta didukung dengan etos kerja yang tinggi dibarengi dengan disiplin ilmu sesuai dengan tugas yang diemban dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, menciptakan kebersamaan dan pendayagunaan peran aktif masyarakat dalam melakukan tugas pelayanan di bidang Pengawasan, yaitu Audit, Evaluasi, Reviu, Pemantauan/ Monitoring dan pengawasan lainnya yang tidak memberikan jaminan kualitas.

Demikian Laporan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini dibuat dalam rangka pertanggung jawaban tugas dan fungsi serta hasil-hasil yang dicapai maupun kegagalan-kegagalan yang dihadapi akan menjadi cambuk bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam pelaksanaan tugas kedepan.

Inspektur,



RUSDIMANTO, S.H., M.Hum.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19641112 199203 1 008